

Pengaruh Kemerdekaan Taiwan terhadap Keamanan Pertahanan, Ekonomi, dan Politik Tiongkok

Muhammad Abdurrohim¹, Yasmin Alya Salsabila², Prilla Marsingga³

Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2210631260010@student.unsika.ac.id¹, 2210631260046@student.unsika.ac.id², prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id³

Abstract: *This article discusses about the Tiongkok-Taiwan conflict with United States intervention and analyzes the impact of the independent Taiwan on Tiongkok's defense, economic, and political security. Taiwan felt ignored during the civil war that occurred in 1945-1949 between the Tiongkok Communist Party (TCP) and the Tiongkok Nationalist Party (TNP), the Communist Revolution in 1949, and Taiwan which has a democratic system is more western-leaning marked by its closeness to the United States makes Taiwan reluctant to unite as part of Tiongkok. This article uses descriptive qualitative research methods that aim to describe the phenomena that exist within the impact of US-influenced Taiwan independence on Tiongkok clearly and factually. The results of this study found that US-influenced Taiwan Independence will have an impact on Tiongkok's defense, economic, and political security, namely: Defense-wise Tiongkok would be threatened by the U.S. military base in Taiwan; Economically reduced state revenues due to the loss of natural resources in Taiwan and obstructed sea trade routes; Politically, democratic ideas will spread and political stability in Tiongkok will be shaken by similar movements in other regions.*

Keywords: *Tiongkok-Taiwan conflict, United States Intervention, The impact of the independent Taiwan on Tiongkok*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai konflik Tiongkok-Taiwan yang terdapat intervensi Amerika Serikat di dalamnya serta menganalisis mengenai dampak yang akan timbul apabila Taiwan Merdeka terhadap keamanan pertahanan, ekonomi, dan politik Tiongkok. Taiwan yang merasa diabaikan pada masa perang saudara yang terjadi pada 1945-1949 antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Nasionalis Tiongkok (PNT), Revolusi Komunis pada tahun 1949, dan Taiwan yang memiliki paham demokratis lebih condong ke barat ditandai dengan kedekatannya dengan Amerika Serikat membuat Taiwan enggan untuk bersatu menjadi bagian dari Tiongkok. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di dalam pengaruh kemerdekaan Taiwan yang dipengaruhi AS bagi Tiongkok secara jelas dan faktual. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Kemerdekaan Taiwan yang dipengaruhi AS akan berdampak pada keamanan pertahanan, ekonomi, dan politik Tiongkok, yaitu: secara Pertahanan Tiongkok akan terancam dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Taiwan; Secara ekonomi berkurangnya pendapatan negara karena hilangnya sumber daya alam yang ada di Taiwan dan jalur perdagangan laut yang terhambat; secara Politik akan menyebarnya paham demokratis dan stabilitasi politik di Tiongkok terguncang karena terjadinya gerakan serupa di daerah lainnya.

Kata Kunci: Konflik Tiongkok-Taiwan, Intervensi Amerika Serikat, Pengaruh kemerdekaan Taiwan terhadap Tiongkok

PENDAHULUAN

Asia Pasifik memiliki posisi ekonomi, politik, dan militer yang strategis dan dinamis. Secara umum perkembangan dan interaksi di Asia Pasifik memiliki pengaruh yang besar bagi keamanan internasional. Karena wilayahnya yang vital membuat negara lain ikut terlibat di kawasan ini. Negara-negara

besar di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Tiongkok dipertemukan di Asia Pasifik, sehingga rentan untuk terjadinya konflik, salah satu konflik yang terjadi adalah konflik Tiongkok-Taiwan (Syahbuddin, 2019). Maka dari itu, artikel ini akan membahas mengenai Pengaruh Kemerdekaan Taiwan

bagi Keamanan Tradisional dan non Tradisional yang mencakup pertahanan, ekonomin dan politik Tiongkok.

Secara historis, Tiongkok memiliki lebih banyak sejarah bersama Taiwan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Pengalaman sejarah tersebut disebabkan oleh kedekatan wilayah Tiongkok dan Taiwan yang hanya terpisah oleh Selat Taiwan. Namun kedekatan geografis bertolak belakang dengan kedekatan politik dan ekonomi. Tiongkok yang memiliki ideologi komunis berlawanan dengan Taiwan yang memiliki ideologi demokratis seperti Amerika Serikat (Syahbuddin, 2019). Dengan kondisi seperti itu, Taiwan seolah ter himpit oleh dua negara super *power* yang memiliki kepentingan berbeda.

Bagi Tiongkok, Taiwan adalah pulaunya yang hilang karena sejak masa Dinasti Sui (586-618) pulau Taiwan yang semula bernama Yizhou telah dikukuhkan di bawah kekuasaan Tiongkok. Taiwan ialah pulau yang sangat strategis. Lepasnya Taiwan dari kekuasaan Tiongkok akan memberikan implikasi yang mendalam dan kompleks bagi Tiongkok. Deklarasi pemisahan atau kedaulatan Taiwan sama saja seperti deklarasi perang bagi Tiongkok. Apabila Tiongkok gagal dalam menahan dan mengembalikan Taiwan ke dalam kekuasaannya, maka hal tersebut akan memicu gerakan yang sama di beberapa tempat seperti Xinjiang dan Tibet. Sedangkan bagi elite Tiongkok, Kemerdekaan Taiwan akan menjadi kelemahan Tiongkok dan begitu pun sebaliknya. Yan Xuetong, direktur Institute of International Studies Universitas Tsinghua mengatakan “*If China lacks the ability to preserve national unity, it cannot rise to be a world power, nor can it achieve national rejuvenation*” (Deng, 2008). Dengan alasan tersebut membuat Tiongkok harus mempertahankan Taiwan demi menjaga keutuhan negaranya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok berpendapat bahwa ini merupakan masalah internal Tiongkok. Hanya ada satu Tiongkok di dunia dan apa yang dilakukan Taiwan tidak mengubah kenyataan dan pernyataan dunia internasional terhadap Taiwan (Syahbuddin, 2019). Pernyataan hanya ada satu Tiongkok ini akan menjadi sebuah kesepakatan yang bernama *One China Policy*.

Tiongkok dan Amerika Serikat pada 1 Januari 1979 menyepakati terbentuknya *Joint Communiqué* yang memiliki arti bahwa

Amerika Serikat mengakui eksistensi satu Tiongkok (*One China Policy*) dan Taiwan adalah teritorial yang berada di bawah kekuasaan Tiongkok (Fajrian & Darmawan, 2015). Dengan adanya kesepakatan ini, Amerika Serikat terlihat berada di pihak Tiongkok.

Di sisi lain, segala upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mempertahankan Taiwan terganggu oleh hadirnya Amerika Serikat yang ikut campur ke dalam masalah ini. Berdasarkan Taiwan *Relations Act* (TRA) yang telah disepakati Amerika Serikat dan telah berlaku sejak 1979, AS merasa memiliki kewajiban untuk menolong dan memastikan keamanan Taiwan. Maka dari itu, Amerika Serikat terus memberikan bantuan ekonomi dan militer ke Taiwan. Diketahui sejak tahun 1980 hingga 2010 penjualan senjata AS ke Taiwan telah mencapai angka 25,39 miliar USD (Arms Control Association, 2012). Dengan adanya intervensi AS di dalam konflik ini membuat keadaan Tiongkok-Taiwan semakin memanas.

Oleh karena itu, sebagai sebuah penelitian, artikel ini akan membahas mengenai ancaman yang akan terjadi bagi Tiongkok apabila Taiwan berhasil menjadi sebuah negara yang independen dan campur tangan Amerika Serikat di konflik ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pernyataan syahbuddin dalam jurnalnya yang berjudul “eksistensi kepentingan global Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok-Taiwan” Tahun 2019, ia menelaah eksistensi kepentingan global Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok-Taiwan. Di mana konflik Tiongkok-Taiwan ini bermula dari adanya perbedaan pandangan mendasar tentang status Taiwan, sehingga adanya perselisihan yang terbentuk karena adanya perbedaan pendapat dan tidak adanya titik temu untuk pendapat keduanya.

Dalam jurnal “strategi peningkatan keamanan Taiwan dalam menghadapi China” Tahun 2022 yang ditulis oleh Rendy Adityo Nugroho menjelaskan bahwa Taiwan memperkuat keamanannya dengan cara bekerja sama dengan Amerika Serikat, di mana AS memiliki kemiliteran tingkat pertama di dunia, sehingga Tiongkok bisa mendapatkan ancaman besar jika harus

berhadapan dengan Taiwan.

Dikutip dari jurnal RR Zahro Hayati Azizah “Mendefinisikan kembali konsep keamanan dalam agenda Negara-Bangsa” Tahun 2020 menjelaskan konsep keamanan dengan pendekatan tradisional dan non-tradisional. Di mana konsep keamanan tradisional lebih menitikberatkan negara (*state*) sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Jadi konsep keamanan dalam pendekatan tradisional adalah suatu kondisi terbebasnya dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari luar atau eksternal negara tersebut (Barry, 1991). Sementara konsep keamanan non-tradisional adalah keamanan yang memperhatikan keselamatan individu, tidak hanya mengenai sektor militer saja, ancaman bisa berasal baik dari dalam maupun dari luar negara, isu mayoritas-minoritas, penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu, pemerintahan yang mengalami krisis legitimasi, masalah diskriminasi, dan kemiskinan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini lebih menganalisis dari perspektif keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional yang mengancam Tiongkok atas kemerdekaan Taiwan. Penelitian ini akan lebih mendeskripsikan mengenai ancaman secara keamanan pertahanan, ekonomi, dan politik bagi Tiongkok atas kemerdekaan Taiwan jika terjadi. Di mana banyak hal yang akan dihadapi oleh Tiongkok, karena hubungan Taiwan dan Amerika Serikat yang sangat erat juga menjadi salah satu alasan Tiongkok harus berpikir dua kali jika melakukan hal yang berhubungan dengan Taiwan. Taiwan pun berkembang secara pesat dari segi ekonomi, keamanan, dan politik sehingga Tiongkok sangat tidak ingin jika Taiwan lepas dari kekuasaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku baik dari Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk

penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di dalam ancaman kemerdekaan Taiwan yang dipengaruhi AS bagi Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Tiongkok-Taiwan

Pada tahun 1895–1945 Jepang berkuasa di Taiwan melalui perjanjian *Shimonoseki*, selama itu Jepang menggunakan Taiwan sebagai pangkalan militer untuk mengirimkan pasukan Jepang ke Asia Tenggara. Selama masa kekuasaan Jepang di Taiwan, Jepang juga melakukan penindasan dengan mencabut kebudayaan masyarakat Taiwan, sehingga mengubah cara pandang masyarakat Taiwan terhadap Tiongkok dengan program *Jepangisasi* (Nugroho, 2022). Kemudian pada akhir masa Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat Jepang harus mengembalikan Taiwan kepada Tiongkok. Pada saat itu Tiongkok sedang dikuasai oleh pemerintahan Nasionalis yang dianggap kurang memedulikan kehidupan rakyat Taiwan (Mubah, 2014). Hal ini membuat sebagian masyarakat Taiwan tidak mendukung pengembalian Taiwan kepada Tiongkok.

Perang yang terjadi di dalam internal Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan Partai Nasionalis Tiongkok (PNT) merupakan perang saudara yang menciptakan gerakan separatisme Taiwan. Pada tahun 1949 terjadi Revolusi Komunis yang mengakibatkan disintegrasi Taiwan-Tiongkok semakin membesar. PNT atau pemerintahan Nasionalis yang mengalami kekalahan mundur ke pulau Formosa yang saat ini bernama Taiwan (FirsanaDewi & Utami Dewi, 2018). Tetapi hal ini tidak menghilangkan keinginan rakyat Taiwan untuk memisahkan diri dari Tiongkok Daratan.

Selain revolusi Komunis, intervensi AS dalam masalah ini pun memperburuk keadaan. Dengan bantuan AS terhadap pemerintahan Nasionalis, Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan menganut sistem demokrasi di tengah Tiongkok yang menganut sistem Komunis yang pada saat itu pertumbuhan ekonominya sedang melambat (Nugroho, 2022). Hal ini membuat Taiwan semakin

yakin untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat.

Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok mengadopsi kebijakan *One China Policy*, yang berarti hanya ada satu Tiongkok yang mencakup Tiongkok daratan, Tibet, Hong Kong, Makau, Xinjiang, dan Taiwan. Kebijakan *One China Policy* ini tercipta karena hubungan Tiongkok dan Taiwan yang menghangat sejak munculnya gerakan kemerdekaan Taiwan. Kebijakan ini juga diakui oleh AS, namun eratnya kerja sama antara AS dan Taiwan di bidang persenjataan militer membuat militer Taiwan semakin kuat dan hal ini dianggap sebagai ancaman besar bagi Tiongkok, hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan Tiongkok. Menurut Tiongkok, Amerika sengaja melakukan hal tersebut dengan mengabaikan kebijakan *One China Policy*, karena menurut negara tersebut, Taiwan dianggap sebagai pulau kecil yang dekat dengan Tiongkok dan bisa dijadikan panggung kekuatan global (Nugroho, 2022). Bantuan militer AS membuat Taiwan semakin kuat untuk menjadi sebuah negara.

Selain dukungan militer yang dianggap sebagai ancaman bagi Tiongkok, Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi kepada Taiwan, sehingga pemerintah Kuomintang mulai membangun perekonomian yang memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi yang pesat dan semakin mengkonsolidasikan stabilitas ekonomi (Fajrian & Darmawan, 2015). Bantuan ekonomi AS membuat pertumbuhan ekonomi Taiwan lebih pesat dibandingkan dengan Tiongkok pada saat itu.

Lee Teng-Hui, yang saat itu menjabat sebagai ketua Kuomintang, melakukan upaya untuk mendapatkan bantuan untuk Taiwan dengan menggunakan kemajuan ekonomi Taiwan sebagai alat untuk menarik perhatian negara lain. Oleh karena itu, AS mendukung penuh Taiwan karena dalam pandangan AS, Taiwan bukanlah Tiongkok; Taiwan adalah Taiwan, sistem politik, ekonomi dan sosial budayanya tidak bisa dibandingkan dengan Tiongkok (Mubah, n.d.). AS melakukannya memiliki alasan dan tujuannya sendiri, yaitu untuk menjadikannya panggung kekuatan global karena Taiwan bisa dianggap sebagai pulau kecil yang dekat dengan Tiongkok.

Gabe Wang (2006, 9-12) merinci adanya enam faktor yang berkontribusi terhadap semakin kompleksnya permasalahan Taiwan. *Pertama*, isu Taiwan yang muncul

akibat ekspansi kekuatan asing menyusul imperialisme modern sebelum Perang Dunia II sehingga menyebabkan Tiongkok terus menjadi negara yang dirugikan. Kegagalan perang dengan Jepang mengecewakan Tiongkok karena Taiwan berada di luar kendali mereka. Dengan demikian, kembalinya Taiwan ke tangan Tiongkok (1945) dan keberhasilan revolusi komunis (1949) menjadi tanda kembalinya martabat Tiongkok; *Kedua*, masalah Taiwan merupakan hambatan besar bagi kedaulatan Tiongkok. Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka atau jatuh ke dalam orbit kekuatan negara lain, karena hal ini akan menimbulkan konsekuensi serius bagi pembangunan ekonomi dan keamanan nasional Tiongkok; *Ketiga*, sejarah unik Taiwan yang membedakannya dengan Tiongkok. Sebab pada masa penjajahan Jepang di Taiwan, Jepang berhasil mencabut budaya Tiongkok dari masyarakat Taiwan; *Keempat*, pemisahan jangka panjang menyebabkan Tiongkok dan Taiwan mengambil jalan yang berbeda dalam pengelolaan negara, di mana Taiwan menganut sistem demokrasi, sedangkan Tiongkok menganut sistem komunis; *Kelima*, isu Taiwan bukan sekedar isu Taiwan, melainkan selalu melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat, negara-negara yang mempunyai kepentingan berbeda. Taiwan, dalam perjanjian dengan Amerika Serikat, juga menentang sistem komunis yang dianut oleh Tiongkok; *Keenam*, perkembangan hubungan politik Taiwan dan Tiongkok sangat dinamis. Ada banyak ketegangan antara kedua faksi, dan meskipun hubungannya sempat membaik, ketegangan kembali terjadi setelah adanya gerakan kemerdekaan Taiwan (Wang, 2006). Intervensi Amerika Serikat di konflik ini membuat Tiongkok dan Taiwan semakin sulit untuk mencapai titik perdamaian, ini disebabkan karena Amerika Serikat melihat beberapa keuntungan apabila Taiwan berhasil melepaskan diri dari Tiongkok.

Menurut Dennis Hickey dalam tulisannya di Taipei *Times* pada 25 Agustus 2014 menyatakan bahwa AS akan terus melanjutkan kerja sama di bidang keamanan dengan Taiwan karena 6 alasan. *Pertama*, AS tetap berkomitmen dalam melaksanakan TRA dan membantu Taiwan agar memiliki pertahanan militer yang kuat; *Kedua*, Penjualan senjata diperlukan

untuk mengimbangi anggaran militer Tiongkok; *Ketiga*, kesamaan ideologi yaitu demokrasi mendorong AS untuk tetap melindungi dan mendampingi Taiwan; *Keempat*, Penjualan senjata yang dilakukan Amerika Serikat akan memperbaiki hubungan lintas selat karena adanya posisi yang *balance* antara Tiongkok dan Taiwan; *Kelima*, Demi meningkatkan integritas Amerika Serikat di mata dunia, maka AS menjaga komitmennya dengan memenuhi perjanjian TRA; *Keenam*, Penggunaan 1.400 roket balistik oleh Beijing yang bertujuan untuk mengancam Taiwan membuat Amerika Serikat tidak merasa penjualan senjatanya kepada Taiwan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian *Shanghai Communique* (Dennis Hickey, 2014). Amerika Serikat adalah negara produsen senjata, sehingga tidak heran jika salah satu tujuan Amerika Serikat di dalam konflik ini adalah untuk berjualan senjata kepada Taiwan walaupun dibungkus dengan alasan untuk membantu Taiwan agar dapat membela diri dari Tiongkok.

Masih menurut Hickey, Tiongkok memandang bantuan AS tersebut ke dalam 6 pengertian yang berbeda. *Pertama*, Tiongkok merasa terancam akibat adanya intervensi penjualan senjata dari Amerika Serikat ke Taiwan; *Kedua*, penjualan senjata membuat Taiwan enggan untuk bernegosiasi karena Taiwan memiliki kekuatan yang mengakibatkan pada sulitnya mencapai perdamaian; *Ketiga*, dengan adanya penjualan senjata membuat gerakan kemerdekaan Taiwan semakin kuat; *Keempat*, Meskipun Taiwan memiliki persenjataan dari Amerika Serikat, itu tidak membuat Taiwan percaya diri untuk bernegosiasi dengan Tiongkok; *Kelima*, penjualan senjata terus dilakukan Amerika Serikat yang tercatat sejak tahun 1979 mencapai angka sebesar 50 miliar USD, hal ini tidak sesuai dengan janji AS yang akan menurunkan penjualan senjata; *Keenam*, persenjataan dari Amerika Serikat tidak membuat Taiwan lebih unggul dari Tiongkok (Dennis Hickey, 2014). Tentunya bantuan Amerika Serikat kepada Taiwan akan menjadi ancaman bagi Tiongkok dan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan *One China Policy*.

Amerika Serikat melihat posisi Taiwan yang strategis secara ekonomi, militer, dan politik. Berikut adalah ke strategisan Taiwan bagi AS: (1) Taiwan yang menganut sistem demokrasi dan lebih pro barat memberikan keuntungan bagi AS; (2) Posisi Taiwan yang

berada di laut Tiongkok memberikan keuntungan bagi AS, karena AS dapat membuat pangkalan militer di Taiwan, sehingga AS dapat menjaga jalur sumber daya dan jalur perdagangan bagi sekutu-sekutunya seperti Jepang; (3) AS dapat mengatur sistem ekonomi Taiwan; (4) Rusia yang memiliki armada militer di Cham Renh Bey Vietnam merasa terancam dengan keberadaan pangkalan militer AS di Taiwan; (5) AS memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran paham komunis ke negara sekutunya; (6) AS memiliki kepentingan mengawasi kawasan ini agar tetap terlihat eksistensinya di kawasan-kawasan regional (Syahbuddin, 2019). Dengan posisi strategis yang banyak menguntungkan AS, membuat AS harus terlibat untuk memastikan ia dapat memanfaatkan posisi tersebut.

Konsep Keamanan Tradisional

Keamanan atau *Security* yang dalam bahasa latin adalah *Securus*, memiliki makna terlepas dari bahaya dan rasa takut. Keamanan tradisional memiliki konsep yang memfokuskan negara (*state*) sebagai aktor utama dan menitikberatkan pada penggunaan militer (Zahroh & Azizah, 2020). Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada tahun 1940 hingga 1990-an telah melahirkan norma "militarisme" yang membuat setiap negara harus memfokuskan pada dua hal: (1) Ancaman militer (*military threats*) lebih bahaya dari ancaman non-militer, sehingga negara harus fokus dalam menangani ancaman militer; dan (2) Militarisasi (*Militarization*) menjadi hal yang wajib bagi negara dengan memperkuat kekuatan militer yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan strategi militer agar mampu mempertahankan kedaulatan negaranya (Richard Ullman, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan tradisional merupakan kondisi di mana negara aman dari ancaman militer atau dalam kata lain kondisi di mana suatu negara dapat mempertahankan dan melindungi dirinya dari agresi militer baik ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal negara tersebut (Barry, 1991). Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer ini terbentuk karena pada era tersebut masih maraknya terjadi konflik senjata antar negara.

Konsep Keamanan Non Tradisional

Konsep keamanan mengalami berbagai perubahan yang signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, saat itu terjadi runtuhnya tembok Berlin, kekalahan rezim komunis di Eropa Timur, dan runtuhnya Uni Soviet. Hal-hal tersebut membuat kondisi Dunia berubah, pertentangan dan peperangan antar negara semakin jarang terjadi. Perubahan kondisi ini membuat tokoh-tokoh keamanan memiliki pandangan baru bahwa keamanan tidak hanya mengenai ancaman militer yang datang dari luar negara saja, tetapi termasuk isu-isu non militer seperti masalah penguasaan sumber daya alam, masalah diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan masalah kemiskinan (Hadiwinata, 2017). Perkembangan pandangan tentang keamanan ini akan melahirkan konsep keamanan baru yang bernama Keamanan Non Tradisional.

Pada tahun 1991, tokoh keamanan bernama Barry Buzan pada karyanya yang berjudul *New Patterns of Global Security in the Twentieth Century* menyatakan bahwa dalam situasi setelah selesainya Perang Dingin, negara-negara berkembang akan menghadapi dimensi keamanan yang baru. Dimensi tersebut yaitu: (1) Keamanan Politik yang meliputi hak-hak berpolitik; (2) Keamanan militer yang meliputi bebas dari ancaman militer dan intervensi dari luar; (3) Keamanan Ekonomi yang meliputi jaminan akses terhadap pasar global; (4) Keamanan Masyarakat yang meliputi bebas dari diskriminatif; (5) Keamanan Lingkungan yang meliputi bebas dari kerusakan lingkungan (Buzan, 1991). Dengan adanya dimensi keamanan yang baru ini, konsep keamanan menjadi semakin luas yang tidak hanya terbatas pada ancaman militer saja.

Ancaman Terhadap Keamanan Tradisional & Non Tradisional Tiongkok Apabila Taiwan Merdeka

Tentunya semua negara tidak menginginkan apabila wilayah teritorialnya berkurang. Begitu pun dengan Tiongkok yang tidak ingin Taiwan lepas dari kekuasaannya karena hal ini akan memberikan dampak yang buruk bagi Tiongkok baik dari keamanan tradisional seperti pertahanan dan dari keamanan non tradisional seperti ekonomi dan politik.

Gambar 1. Peta Kedekatan Tiongkok dan Taiwan



Dampak yang sangat signifikan dan membuat Tiongkok untuk tetap bersikeras mempertahankan Taiwan adalah Pertahanan dan Keamanan. Dalam konflik Tiongkok-Taiwan terdapat intervensi AS yang memiliki kepentingannya sendiri, yang mana AS adalah musuh terbesar Tiongkok. Oleh karena itu, apabila Taiwan lepas bukan berarti Tiongkok hanya mengalami kekalahan dari Taiwan, tetapi kekalahan dari AS juga. Apabila Taiwan lepas, AS dapat mendirikan pangkalan militer yang berdekatan dengan Tiongkok daratan yang mana ini sangat mengancam pertahanan dan keamanan Tiongkok, dengan begitu AS juga dapat dengan mudah memantau segala aktivitas Tiongkok (Syahbuddin, 2019). Apabila Taiwan lepas, kekuatan militer Tiongkok akan diremehkan oleh dunia internasional karena tidak bisa mempertahankan kedaulatan negaranya.

Ancaman Terhadap Keamanan Ekonomi Tiongkok Atas Kemerdekaan Taiwan

Pada dasarnya dalam hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan adalah mitra yang baik. Namun dengan adanya hubungan ekonomi tersebut tidak mengurangi ketegangan antar Tiongkok dan Taiwan (FirsanaDewi & Utami Dewi, 2018). Ketegangan yang berlangsung sangat signifikan, di mana Tiongkok dan Taiwan menjalin hubungan yang baik karena adanya tujuan dan kepentingan masing-masing.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Taiwan



Secara ekonomi, walaupun perekonomian Tiongkok termasuk ke dua terbesar di Dunia, lepasnya Taiwan akan berdampak karena Taiwan memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pertumbuhan ekonomi Taiwan selalu naik setiap tahunnya seperti tergambar pada tabel nomor 1 (Gusriandari, 2023). Oleh karena itu, lepasnya Taiwan akan berdampak pada perekonomian Tiongkok dengan hilangnya kekayaan Tiongkok di Taiwan.

Dari segi sumber daya alam, Taiwan memiliki beragam sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pemasukan Tiongkok, diketahui Taiwan memiliki cadangan batu bara sekitar 180 juta ton; Minyak dan Gas alam yang dimiliki Taiwan diperkirakan lebih dari 1 miliar meter kubik yang berada di Kotapraja Gongguan dan pada tahun 2012 Taiwan tercatat dapat memproduksi 20.000 barel minyak per hari; Taiwan diketahui memiliki 4 simpanan utama yang mengandung emas dengan perkiraan 100 ton logam mulia, salah satu tambang emas terbesar di Taiwan adalah Tambang Jinguashi yang berada di Distrik Ruifang dan diprediksi memiliki simpanan 8 juta ons emas; Salah satu negara terbesar yang memiliki Marmer adalah Taiwan, diperkirakan Taiwan memiliki 30 miliar metrik ton deposit marmer. Marmer menjadi ekspor yang paling menjanjikan dari Taiwan; Negara ini adalah salah satu eksportir utama semen yang segmentasi pasarnya berada di Malaysia, Ghana, Indonesia, dan Australia. Pada 2013, Taiwan memproduksi 26 juta ton semen per tahun (“Apa Sumber Daya Alam Utama Taiwan?,” 2023). Itu adalah beberapa sumber daya alam yang berada di Taiwan, sehingga apabila Taiwan lepas, Tiongkok akan kehilangan sumber daya tersebut yang mempengaruhi perekonomian Tiongkok.

Ancaman terhadap Keamanan Politik Tiongkok atas Kemerdekaan Taiwan

Isu Taiwan bukan hanya masalah berpisahnya Taiwan saja, tetapi terdapat AS yang memiliki kepentingan juga. Maka dari itu dampak secara Politik apabila Taiwan lepas dari Tiongkok akan mengakibatkan penyebaran paham liberalisme di dekat Tiongkok, yang mana ini sangat bertentangan dengan ideologi komunisnya. Jika hal ini terjadi, kondisi politik di Tiongkok akan terguncang karena gerakan separatisme Taiwan akan memicu pemberontakan yang sama di Tibet, Xinjiang, Macau, Hong kong, dan berbagai daerah lainnya (Deng, 2008). Selain itu, lepasnya Taiwan akan membuat Tiongkok lemah secara politik di dunia internasional dan kredibilitasnya sebagai negara *super power* di dunia akan hilang.

KESIMPULAN

Menurut penelitian yang masih berlangsung hingga saat ini mengenai masalah Taiwan dan Tiongkok, ada aktor lain yaitu Amerika Serikat. AS dinilai ambigu dalam persoalan ini karena mendukung kedua belah pihak dengan tujuan masing-masing namun lebih condong ke Taiwan. Dengan demikian, jika Taiwan merdeka, Tiongkok akan sangat dirugikan dalam hal keamanan pertahanan, ekonomi dan politik, karena Taiwan tidak akan berada di bawah kendalinya. Taiwan yang memiliki kemajuan ekonomi yang pesat, di saat Tiongkok mengalami keterlambatan perkembangan ekonomi dan Tiongkok yang selalu mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menyerang Taiwan atau tidak, karena Taiwan mendapat dukungan militer penuh dari Amerika Serikat, yang merupakan perlindungan keamanan lapis pertama di dunia, Taiwan menjadikan AS sebagai payung pertahanan bagi Taiwan. AS memainkan peran besar dalam kebijakan Taiwan karena kebijakan tersebut akan digunakan sebagai poros pertahanan Taiwan dan AS untuk mempertahankan posisi Taiwan sebagai provinsi yang merdeka dari Tiongkok. Semua gangguan Tiongkok terhadap Taiwan akan dibendung oleh AS untuk menjalin terus kerja sama yang baik dengan Taiwan agar stabilitas kawasan dan sekaligus pengamanan kepentingan negara ini di Pasifik Barat terus berlangsung. Pada intinya Tiongkok akan merasakan banyak ancaman jika gerakan

kemerdekaan Taiwan ini berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Apa Sumber Daya Alam Utama Taiwan? (2023). *Perbedannya.com*.
- Arms Control Association. (2012). *U.S. Conventional Arms Sales to Taiwan*. CHIhttps://www.armscontrol.org/factsheets/
- Barry, B. (1991). People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era. *Harvester Wheatsheaf*.
- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the twentieth century. *International Affairs*, 67(3).
- Deng, Y. (2008). *China's struggle for status: the realignment of international relations*. Cambridge University Press.
- Dennis Hickey. (2014, August 25). US, China agree in disagree. *Taipei Times*.
- Fajrian, O. :, & Darmawan, E. B. (2015). Dampak Kerjasama Militer Amerika Serikat-Taiwan Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Cina. In *JOM FISIP* (Vol. 2, Issue 2). <http://gbirocktaiwan.wordpress.com/category/taiwan/sejar>
- FirsanaDewi, I., & Utami Dewi, K. (2018). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72136>
- Gusriandari, W., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (n.d.). Strategi Ekonomi Tiongkok Menghadapi Intervensi Amerika Serikat Melalui Taiwan. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health E-ISSN*.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mubah, A. S. (n.d.). *Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat*.
- Nugroho, R. A. (n.d.). *Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China*. 2(1).
- Richard Ullman. (2011). *Redefining Security* (Christoper & Lai Yew). Routledge.
- Stkip, S., & Siswa Bima, T. (2019). *Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan*. 9(2). <https://zakariaselbilad>.
- Wang, G. T. (2006). *China and the Taiwan issue: impending war at Taiwan Strait*. University Press of America.
- Zahroh, R. R., & Azizah, H. (n.d.). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6, 2020.